

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran (Dimas dan Woyanti, 2009).

Penyerapan tenaga kerja dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, dengan maksud bahwa penyerapan tenaga kerja mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam usaha memajukan perekonomian bangsa. Usaha yang dimaksud dalam bidang ini adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Kesempatan kerja, kuantitas, serta kualitas tenaga kerja menjadi indikator penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai fungsi yang menentukan dalam pembangunan, diantaranya tenaga kerja sebagai

sumber daya untuk menjalankan proses produksi serta distribusi barang dan jasa, dan tenaga kerja sebagai sasaran untuk menghidupkan dan mengembangkan pasar. Kedua fungsi tersebut memungkinkan berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus dalam jangka panjang, atau dapat dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan motor penggerak dalam pembangunan (Suroto, 1992).

Salah satu tema utama bidang ketenagakerjaan adalah penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah pendapatan nasional, tingkat investasi, dan upah tenaga kerja. Perubahan pada faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Adanya penyerapan tenaga kerja ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Penyerapan tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai permintaan terhadap tenaga kerja di pasar tenaga kerja (*demand for labour force*), oleh karena itu penyerapan tenaga kerja sama dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia di dunia kerja, maka semakin meningkat kegiatan pembangunan akan semakin banyak penyerapan tenaga kerja yang tersedia (Roni, 2010).

Kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus berpendapat bahwa selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tingkat perkembangan penduduk yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Jika penduduk dapat memperoleh pekerjaan, maka hal ini akan dapat meningkatkan

kesejahteraan bangsanya. Tetapi jika tidak memperoleh pekerjaan berarti mereka akan menganggur, dan justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah (Irawan dan Suparmoko, 2002).

Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Pada dasawarsa yang lalu, masalah pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri. Seiring dengan berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh "terbatasnya permintaan" tenaga kerja, yang selanjutnya semakin dicitutkan oleh faktor-faktor eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya masalah utang luar negeri dan kebijakan lainnya, yang pada gilirannya telah mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah, dan akhirnya, penyediaan lapangan kerja (Todaro, 2000).

Semakin besar kesempatan kerja bagi tenaga kerja maka kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin baik, dan sebaliknya. Di sisi lain, meningkatnya jumlah angkatan kerja dalam waktu yang cepat dan jumlah yang tinggi, sementara kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas akan menyebabkan timbulnya pengangguran. Inilah yang membuat permasalahan ketenagakerjaan secara langsung maupun tidak langsung akan berkaitan dengan masalah-masalah lainnya seperti ketidakmerataan pendapatan, kemiskinan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan instabilitas politik. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka

meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran yang berimplikasi terhadap lambatnya laju pertumbuhan ekonomi, mengingat semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja (Roni, 2010).

Pasar tenaga kerja, seperti pasar lainnya dalam perekonomian dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan, namun pasar tenaga kerja berbeda dari sebagian besar pasar lainnya karena permintaan tenaga kerja merupakan tenaga kerja turunan (*derived demand*) dimana permintaan akan tenaga kerja sangat tergantung dari permintaan akan output yang dihasilkannya (Mankiw, 2000). Dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Dengan menelaah hubungan antara produksi barang-barang dan permintaan tenaga kerja, akan dapat diketahui faktor yang menentukan upah keseimbangan.

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja (Simanjuntak, dalam Gianie, 2009:1). Di Indonesia, pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Upah minimum yang ditetapkan tersebut berdasarkan pada Kebutuhan Fisik Hidup Layak berupa kebutuhan akan pangan sebesar . Dalam Pasal 1 Ayat 1 dari

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 1/1999, upah minimum didefinisikan sebagai ” Upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap”

Pembahasan mengenai upah terutama upah minimum sering terjadi perdebatan, dimana kebanyakan para ekonom menyatakan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum sering menyebabkan terjadinya pengangguran untuk sebagian pekerja. Dapat diketahui hubungan upah dengan penyerapan tenaga kerja memiliki dua sisi yaitu kenaikan upah dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja dan kenaikan upah juga dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja. Apabila melihat upah dari sisi demand maka akan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja dan apabila melihat upah dari sisi supply maka akan berpengaruh positif bagi penyerapan tenaga kerja.

Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi dapat pula beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah.

Menurut hasil estimasi, penduduk di Provinsi Lampung pada tahun 2012 mencapai 7.767.312 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 106,09. Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Lampung tampak masih timpang atau tidak merata antar wilayah. Dibandingkan dengan kabupaten, kepadatan penduduk di kota umumnya sangat tinggi. Seperti tingkat kepadatan penduduk kota Bandar Lampung mencapai 2.417 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk di semua kabupaten masih berada dibawah 600 jiwa per

kilometer persegi, bahkan Kabupaten Lampung Barat baru mencapai 86 jiwa per kilometer persegi.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah daerah mengurangi jumlah penduduk miskin. Dalam penyajian data ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menggunakan batasan umur 15 tahun ke atas dari semua penduduk dan dikenal dengan istilah penduduk usia kerja di Provinsi Lampung.

**Tabel 1. Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ( Dalam Juta Jiwa)**

Tahun	Penduduk	Usia kerja	Angkatan Kerja	Bekerja dan Penyerapan Tenaga Kerja	Menganggur
2001	6.724.052	4.590.431	3.731.869	3.466.784	265.085
2002	6.787.654	4.643.848	3.932.932	3.620.103	265.085
2003	6.852.998	4.727.590	4.113.736	3.780.202	333.534
2004	6.915.951	4.808.534	4.303.123	3.947.383	355.740
2005	6.983.676	4.895.054	4.488.878	4.121.958	366.920
2006	7.504.834	4.950.973	4.587.186	4.211.861	375.325
2007	7.127.056	5.007.712	4.687.646	3.281.351	317.674
2008	7.391.128	5.248.138	3.568.770	3.313.553	255.167
2009	7.500.674	5.351.935	3.627.155	3.387.175	240.110
2010	7.500.674	5.367.848	3.686.346	3.462.297	224.049
2011	7.691.007	5.426.127	3.761.621	3.547.030	214.591
2012	7.691.097	5.523.672	3.632.415	3.616.574	215.841

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Lampung, 2013*

Tabel 1 menunjukkan penduduk Provinsi Lampung tahun 2001 berjumlah 6.724.052 jiwa terdiri dari 3.731.869 jiwa angkatan kerja, sedangkan penyerapan tenaga kerja berjumlah 3.466.784 jiwa, sehingga tingkat pengangguran yang terjadi berjumlah 265.085 jiwa. Pada tahun 2004 jumlah penduduk meningkat menjadi 6.915.95 jiwa, jumlah penduduk yang meningkat juga diiringi jumlah penyerapan tenaga kerja yang meningkat yaitu sebanyak 3.947.383 jiwa, walaupun jumlah penyerapan tenaga kerja meningkat tetapi jumlah penduduk yang menganggur tidak mengalami pengurangan, jumlah pengangguran pada tahun 2004 sebanyak 355.740 jiwa. Pada tahun 2011 jumlah penduduk di Provinsi Lampung meningkat menjadi 7.691.007 jiwa, pada tahun 2011 penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan yaitu menjadi 3.547.030 jiwa, jumlah penduduk yang meningkat dan penyerapan tenaga kerja yang meningkat ternyata mampu mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Lampung, jumlah pengangguran pada tahun 2011 menjadi 214.591 jiwa. Jumlah penduduk pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu menjadi 7.691.097 jiwa. Pada tahun 2012 angkatan kerja yang tersedia berjumlah 3.632.415 jiwa. Jumlah penyerapan tenaga kerja pada tahun 2012 ternyata lebih besar dibandingkan tahun 2011, yaitu sebesar 3.616.574 jiwa. Meskipun jumlah penyerapan tenaga kerja pada tahun 2012 lebih besar dibandingkan tahun 2011, tetapi jumlah pengangguran pada tahun 2012 lebih besar dibandingkan tahun 2011 yaitu berjumlah 215.841 jiwa.

Upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja terus dilakukan, salah satunya melalui penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Peningkatan upah minimum dapat menjadi indikator bagi sektor-sektor ekonomi

dalam melakukan permintaan terhadap tenaga kerja. Ketika upah minimum meningkat para pengusaha umumnya akan melakukan substitusi terhadap tenaga kerja. Seperti halnya ketika upah minimum naik maka para pengusaha lebih memilih untuk mempekerjakan pekerja yang ada dari pada menambah pekerja baru.

**Tabel 2: Besarnya kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Pekerja dan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2001-2012 (rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Kebutuhan Hidup Minimum</b>	<b>Upah Minimum Provinsi</b>	<b>Surat Keputusan Gubernur Lampung</b>
2001	260.685	240.000	No.G/388/B.VII/HK/2001 Tanggal 22 Desember 2001
2002	325.000	310.000	No.G/346/B.VII/HK/2002 Tanggal 22 November 2002
2003	403.000	350.000	No.G/002/B.VII/HK/2003 Tanggal 2 Januari 2003
2004	377.500	377.500	No.G/379/B.VIII/HK/2003 Tanggal 23 Desember 2003
2005	399.456	405.000	No.G/407/B.VII/HK/2004 Tanggal 15 Desember 2004
2006	589.540	505.000	No. G/473/B.VII/HK/2005 tanggal 31 Desember 2005
2007	554.21	555.000	No.G/515/B.VII/HK/2006 Tanggal 29 Desember 2006
2008	650.000	617.000	No.G/617/B.VII/HK/2007/Tanggal 17 Desember 2007
2009	805.308	691.000	No.G/652/B.VII/HK2008/Tanggal 17 Desember 2008
2010	861.340	767.500	No.G/681/III.05/HK/2009/Tanggal 19 November 2009
2011	897.600	855.000	No.G/682/III.05/HK/2010/Tanggal 29 Desember 2010
2012	1.008.109	975.000	No.G /757/III.05/HK/2011/Tanggal 29 Desember 2011

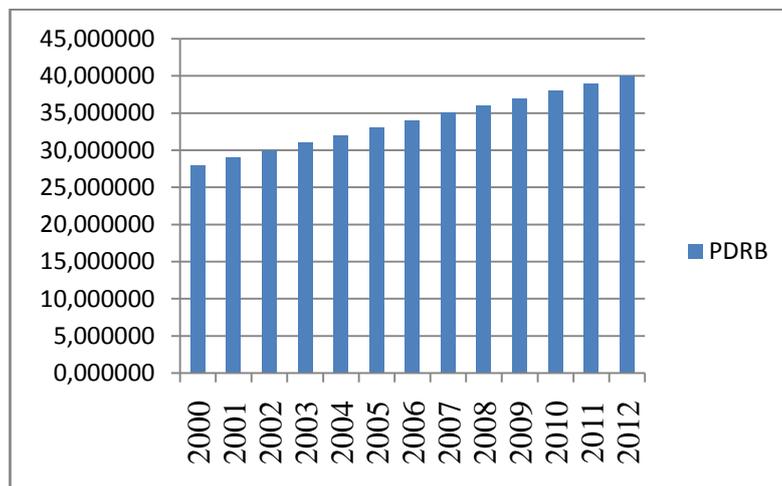
*Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2013*

Upaya Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan UMP terus dilakukan.

Penetapan kebijakan UMP disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum

masyarakat Provinsi Lampung. Pada tahun 2012 pemerintah provinsi lampung menetapkan UMP sebesar Rp 1.150.000. Dengan jumlah UMP yang ditetapkan maka akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga di Provinsi Lampung.

Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru ternyata tidak mampu merealisasikan harapan. Tambahan tenaga kerja yang terserap relatif kecil angka pengangguran masih saja tinggi. Hal ini terjadi antara lain karena adanya pengaruh serikat kerja dan intervensi pemerintah dalam penentuan upah minimum. Sebab lain adalah banyaknya pencari kerja dengan tingkat pendidikan tertentu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pasar kerja. Kondisi ideal dari pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan tenaga kerja adalah ketika pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi pertumbuhan tenaga kerja secara lebih besar .



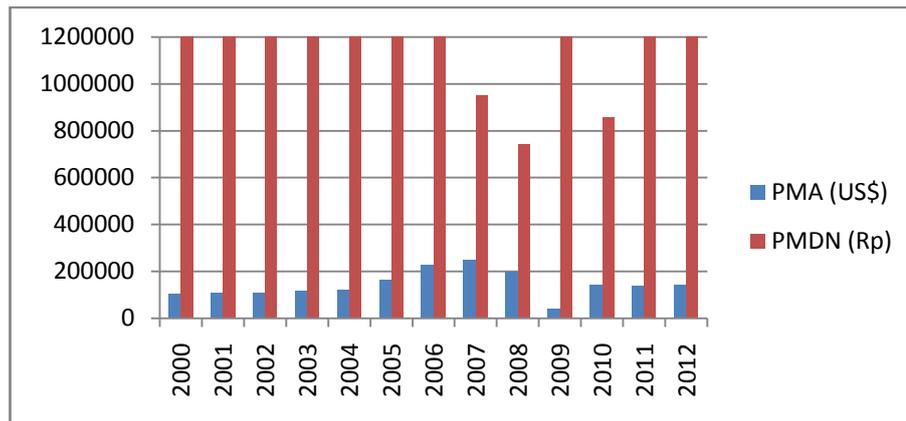
Sumber: BPS, Provinsi Lampung, 2013

**Gambar 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Tahun Dasar 2000 (Dalam Juta Rupiah).**

Dapat dilihat pada Gambar 1 berdasarkan perhitungan PDRB Provinsi Lampung dengan tahun dasar 2000, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar dibidang produksi.

Untuk meningkatkan perekonomian di suatu daerah, pemerintah senantiasa menciptakan keadaan agar meningkatkan investasi, karena dengan adanya investasi maka akan meningkatkan produksi dan juga berdampak pada tingkat penyerapan tenaga kerja. Selain itu pemerintah juga mencengah tingginya tingkat pengangguran. Investasi merupakan pengeluaran pemerintah dan non pemerintah (swasta) dimana membutuhkan modal riil untuk mendirikan perusahaan baru dengan hasil keuntungan mereka dan dapat memperluas usaha yang telah ada sehingga dampak positifnya adalah memberikan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu pula dapat memperoleh keuntungan besar dari pada modal awal untuk menginvestasikan modalnya tersebut. Upaya tersebut yang memicu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung khususnya investasi yang berorientasi padat karya sehingga dapat memperluas lapangan kerja, dari pada padat modal yang hanya menambah modal terus menerus tetapi tidak berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja.

Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Lampung pada tahun 2000-2012 dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: BPMD Provinsi Lampung, 2013

**Gambar 2. PMA dan PMDN Provinsi Lampung pada tahun 2001-2012**

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan PMA dan PMDN di Provinsi Lampung berfluktuatif. Pada tahun 2003 sampai tahun 2006 PMDN mengalami peningkatan, namun pada tahun 2007 sampai 2009 mengalami penurunan, di tahun 2010 kembali mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2010 dan kembali naik pada tahun 2011 dan 2012. Begitu pula dengan PMA yang berfluktuatif setiap tahunnya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, juga mencerminkan naik turunnya pembangunan ekonomi.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja telah banyak dilakukan, salah satunya yang dilakukan oleh Akmal Roni (2010), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan PDRB akan mempengaruhi peningkatan penyerapan tenaga kerja, *ceteris paribus*. Variabel UMP secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan UMP akan mempengaruhi peningkatan penyerapan tenaga kerja, *ceteris*

*paribus*. Variabel investasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Kenaikan investasi akan mempengaruhi peningkatan penyerapan tenaga kerja, *ceteris paribus*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul

**“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2000-2012”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana UMP berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana investasi swasta berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung?

**C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah;

1. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.
2. Untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB)

terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.

3. Untuk menganalisis pengaruh investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.

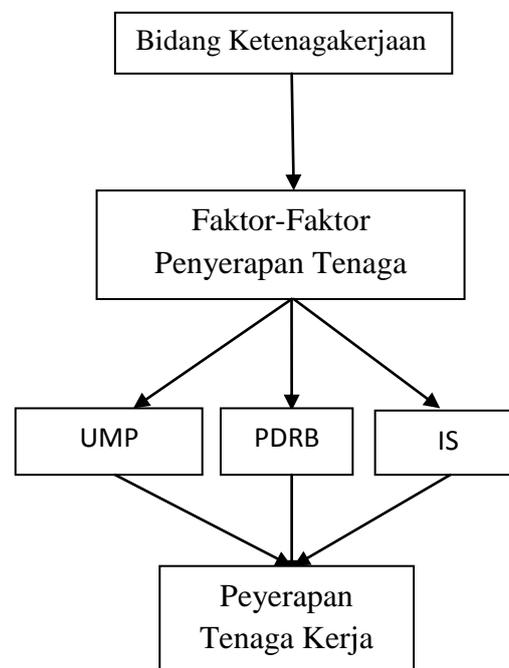
#### **D. Kerangka Pemikiran**

Pengangguran merupakan problema yang sulit dipecahkan hingga kini pada negara yang sedang berkembang, Masalah dalam ketenagakerjaan menjadi salah satu masalah yang tidak pernah terselesaikan. Salah satunya yang terjadi di Provinsi Lampung. masalah ketenagakerjaan ini membuat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Pemerintah sebagai salah satu instansi yang bertugas sebagai pemecah masalah harus mampu mengatasi hal tersebut.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah yang cukup luas dan mempunyai sumber daya manusia serta alam yang cukup memadai serta jumlah penduduk yang tidak sedikit. Karena adanya sumber daya manusia dan alam yang memadai ditambah peran pemerintah khususnya dalam hal ini adalah meningkatkan upah minimum, PDRBserta investasi swasta diharapkan dapat memaksimalkan dan memperluas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung.

Permasalahan ketenagakerjaan merupakan masalah bagi suatu daerah yang jumlah pertumbuhan penduduknya tinggi tetapi tidak diimbangi dengan perluasan penyerapan tenaga kerja. Karena dengan persentase tingkat penyerapan tenaga kerja rendah maka semakin banyak penduduk yang menganggur namun sebaliknya bila tingkat presentase penyerapan tenaga kerja tinggi maka tingkat atau jumlah orang yang menganggur akan berkurang. Bila seperti itu maka perekonomian dalam suatu daerah dapat dikatakan baik.

Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang tidak secepat dengan laju pertumbuhan penduduk. Sehingga antara UMP, PDRB, dan investasi swasta berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Lampung adapun pemikiran penelitian disajikan pada gambar 3:



**Gambar 3: Kerangka Pemikiran**

## **E. Hipotesis**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga Upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Diduga Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja

Jumlah penyerapan tenaga kerja dalam hal ini adalah jumlah tenaga kerja yang terserap di Provinsi Lampung pada tahun 2000-2012 yang terserap pada pasar tenaga kerja dengan berbagai tingkat upah.

2. Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi yaitu balas jasa yang diterima para pekerja atas pengorbanan yang dilakukan yang telah ditetapkan jumlahnya oleh pemerintah Provinsi Lampung. UMP yang digunakan pada penelitian ini adalah UMP tahun 2000-2012 yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan gubernur Provinsi Lampung disetiap tahunnya.

### 3. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam waktu tertentu. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB di Provinsi Lampung atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha antara tahun 2000-2012 .

### 4. Investasi Swasta

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga seperti saham dan obligasi. Investasi langsung yang dikenal dengan PMA merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisi perusahaan.

keseluruhan nilai realisasi investasi yang memperoleh fasilitas dari pemerintah berupa PMA dan PMDN yang dilakukan Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2000-2012. Dalam hal ini PMA yaitu perusahaan asing yang ada di Provinsi Lampung dan juga PMDN yaitu perusahaan-perusahaan milik pemerintah di Provinsi Lampung.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

- Bab II : Tinjauan pustaka yang berisi tujuan teoritis dan tinjauan empiris yang relevan dalam penulisan skripsi ini.
- Bab III : Metode penelitian yang terdiri dari tahapan penelitian, sumber data, batasan peubah variabel, dan metode analisis
- Bab IV : Hasil perhitungan dan pembahasan
- Bab V : Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN